

PERAN HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DALAM KONFLIK AGAMA DI INDIA 2019-2022

Oleh : Azlan Syah Putra

Pembimbing: Irwan Iskandar. S.IP., MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes the role of Human Rights Watch (HRW) in Religious Conflict in India 2019-2022. Longing religion conflict become a serious problems for citizens of India, especially Indian Moeslem and international citizens. On December, 12nd. 2019, Indian government in Modi and Bharatiya Janaya Party (BJP) had passed the Indian Citizenship Act 2019 which is an amendment to the Citizenship Act 1955 which regulates the entry of immigrants from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh based on the religion authorized in the Act. These include: Hindus, Buddhists, Sikhs, Christians, Jains and Parsis before 2015. However, the exclusion of Islam from the law caused massive protests throughout India.

This research uses Qualitative methods, collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, articles, websites, etc. This study also uses the perspective of constructivism and the Theory of International Organization.

This research indicates that HRW has played a major role in the religious conflict in India by making investigative reports and reporting the results of his findings to the world, including the United Nations. Despite HRW has had a significant impact on the religious conflicts that occur in India, The Indian government actually refused to admit its actions and threatened HRW for interfering too much in its domestic affairs.

Keywords: HRW, Religion Conflict, Citizenship Act, India

PENDAHULUAN

India adalah sebuah negara di Asia Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 miliar orang. India merupakan negara ketujuh terbesar di dunia berdasarkan luas wilayahnya, dan negara terpadat di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat.¹ India dikenal dengan keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan masakan. Ibu kota India adalah New Delhi, dan negara ini memiliki bentuk pemerintahan demokrasi parlementer federal. Ekonomi India adalah yang keenam terbesar di dunia berdasarkan PDB nominal, dan diklasifikasikan sebagai negara berkembang. India memiliki sejarah yang kaya dan memiliki beberapa landmark terkenal di dunia, seperti Taj Mahal dan Red Fort.

India memiliki berbagai sumber daya alam, termasuk batu bara, bijih besi, gas alam, berlian, dan minyak bumi. Negara ini juga dikenal karena produksi pertaniannya, dengan tanaman seperti beras, gandum, dan kapas menjadi ekspor utama. India adalah rumah bagi berbagai agama, dengan Hinduisme menjadi agama yang paling banyak dianut, diikuti oleh Islam, Kristen, Sikhisme, Buddha, dan Jainisme. Bahasa resmi India adalah Hindi dan Inggris, tetapi ada lebih dari 20 bahasa daerah yang diakui yang digunakan di seluruh negara.

Meskipun memiliki sejarah dan warisan budaya yang kaya, India menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemiskinan, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Namun, negara ini telah membuat kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam bidang teknologi, bisnis, dan pendidikan.

¹ Live World Population Clock "India" <https://worldpopulationclock.info/india>

Human Rights Watch (HRW) merupakan organisasi internasional non pemerintah (INGO) yang terbentuk berdasarkan "*Helsinki's Watch*" yang merupakan penyempurnaan dari Helsinki's Final Act 1975, di New York City, Amerika Serikat pada tahun 1978. Organisasi Internasional ini dibentuk menyelidiki pelanggaran hak di negara-negara yang menandatangani Kesepakatan Helsinki, terutama negara-negara di balik Tirai Besi seperti Uni Soviet. Sejak itu, HRW tersebar luas ke lima benua. HRW menyelidiki pembantaian dan bahkan genosida, bersama dengan pengambilalihan media oleh pemerintah dan penangkapan aktivis dan tokoh oposisi politik yang tidak berdasar. Pada saat yang sama, HRW memperluas pekerjaan ruang lingkup kerja untuk mengatasi pelanggaran terhadap mereka yang menghadapi diskriminasi, termasuk perempuan, kelompok LGBT, dan penyandang disabilitas.²

Sejarah konflik agama Hindu-Islam sudah lama terjadi di India sejak 1947 dimana umat Hindu-Islam berkonflik satu sama lain di India yang dimana berujung terbentuknya Pakistan³ serta terbunuhnya salah satu tokoh umat Hindu oleh Ekstrimis Hindu yang anti-Islam saat itu, Mahatma Gandhi.⁴ Hingga saat ini, India yang dipimpin oleh Perdana Menteri India dari Partai Bharatiya Janata (BJP) Narendra Modi, konflik Hindu-Islam semakin meningkat sehingga kasus pelanggaran HAM berat terus menimpa umat Islam di konflik tersebut.

² *Human Rights Watch "About Us"* <https://www.hrw.org/about/about-us>

³ Nawaz, Shuja (May 2008), "*The First Kashmir War Revisited*", *India Review*, 7 (2): 115–154, doi:[10.1080/14736480802055455](https://doi.org/10.1080/14736480802055455), *S2CID* 155030407

⁴ Hardiman, David (2003), *Gandhi in His Time and Ours: The Global Legacy of His Ideas*, Columbia University Press, pp. 174–76, ISBN 9780231131148

Pemerintah India yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang beraliran nasionalis Hindu meningkatkan tindakan kekerasannya terhadap masyarakat sipil dan media. Pihak berwenang menuntut para aktivis, jurnalis, pengunjuk rasa damai, dan pengkritik lainnya atas tuduhan kontraterorisme dan ujaran kebencian yang dibuat-buat. Mereka menutup kelompok-kelompok hak asasi manusia dengan menggunakan peraturan pendanaan asing atau tuduhan penyimpangan keuangan yang tidak berdasar. Pemerintah telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi agama minoritas, terutama Muslim. Hal ini, ditambah dengan fitnah terhadap Muslim dan minoritas lainnya oleh beberapa pemimpin BJP, dan kegagalan polisi untuk menindak para pendukung pemerintah yang melakukan kekerasan, telah mendorong kelompok-kelompok nasionalis Hindu untuk menysar anggota masyarakat minoritas atau kelompok masyarakat sipil tanpa hukuman selama masa pemerintahan Narendra Modi (2019-2022).⁵

Di era pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi tahun 2019-2022, keamanan umat Islam di India semakin terancam dengan adanya eskalasi konflik umat Hindu dengan umat Islam yang semakin merajalela, terhitung sejak 4 Desember 2019, Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019⁶ yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 mengatur naturalisasi menjadi warga negara India bagi beragama Sikh, Hindu, Buddha, Nasrani, Jain, dan Parsi dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh yang ingin memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014. Undang-Undang ini diprotes keras oleh masyarakat

India yang beragama Islam karena tidak bisa menjadi warga negara India dan bahkan membungkam eksistensi Islam di India.

India mengalami konflik agama antara tahun 2019 hingga 2022, yang ditandai dengan adanya bentrokan antar kelompok agama dan diskriminasi terhadap minoritas agama. Konflik agama ini melibatkan kelompok Hindu dan Muslim, dan memiliki akar masalah yang berkaitan dengan perbedaan budaya dan politik.

KERANGKA TEORI

Perspektif : Pluralisme

Beberapa paradigma baru yang muncul pada era 1990-an hingga 2000-an yaitu pluralisme dan feminisme yang menambah kajian hubungan internasional.⁷ Menurut pendapat Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, terdapat 3 asumsi penting dalam pluralisme yaitu:⁸

1. Aktor non negara merupakan aktor yang penting dalam hubungan internasional
2. Negara bukan aktor yang rasional dan tunggal, tetapi terdiri dari berbagai birokrasi yang bersaing, kelompok, dan individu.
3. Agenda politik internasional itu luas, bukan hanya tentang masalah keamanan saja.

Salah satu aktor non negara dalam hubungan internasional yakni kelompok agama. Selanjutnya asumsi dari pluralisme yaitu agenda dalam hubungan internasional itu sangat luas dan bervariasi, bukan hanya tentang isu militer dan

⁵ Human Rights Watch "India" <https://www.hrw.org/asia/india>

⁶ "The Citizenship (Amendment) Bill, 2019" (PDF). PRS India.

⁷ M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik," Jurnal Transnasional, Volume 3, Nomor 2 (2012): hal 2

⁸ Viotti, Paul R. , dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory. Fifth Edition*, New York: Longman, 2011

keamanan. Adapun isu yang menjadi perhatian yakni isu ekonomi dan sosial.⁹

Teori Organisasi Internasional

Menurut pendapat Clive Archer, peran organisasi internasional yaitu:¹⁰

1. Organisasi internasional sebagai Aktor Independen

Organisasi internasional sebagai aktor independen yang dapat bertindak tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak luar. Organisasi internasional sangat penting dan berpengaruh dalam hubungan internasional. Organisasi internasional sebagai aktor dapat membuat keputusan sendiri, dan dapat mempengaruhi perilaku negara anggotanya. Organisasi internasional terbebas dari pengaruh, tekanan, dan paksaan dari pihak luar dalam membuat dan menetapkan keputusan.

2. Organisasi internasional sebagai arena

Organisasi internasional berperan sebagai arena atau forum, yang mana organisasi internasional memfasilitasi tempat pertemuan bagi negara anggota untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama. Negara anggota menjadikan organisasi internasional sebagai tempat untuk bertemu dan berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi.

3. Organisasi internasional sebagai instrumen

Organisasi berperan sebagai instrumen atau alat yang digunakan oleh negara anggota untuk mencapai tujuan atau kepentingan negara anggota. Selanjutnya organisasi internasional berperan sebagai alat atau sarana bagi negara anggota untuk melakukan diplomasi.

1. 4. 3. Level Analisa

Level analisa pada penelitian ini adalah pengelompokan negara-negara. Negara bangsa dalam hubungan

internasional tidak bertindak sendiri, melainkan bergabung dan bertindak sebagai kelompok. Negara membentuk kelompok baik di tingkat regional maupun global. HRW merupakan Organisasi Internasional non pemerintah berskala Global yang terdiri dari beberapa negara anggota yang bermarkas di New York City, Amerika Serikat. Dalam level analisa ini penulis lebih fokus meneliti bagaimana HRW menangani konflik agama yang mengalami konflik di India pada masa pemerintahan Narendra Modhi (2019-2022).¹¹

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian hubungan internasional. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang meningkatkan pemahaman dari peneliti tentang fenomena, aktivitas, dan proses-proses sosial, yang meletakkan perhatian lebih kepada makna dan pemahaman dibandingkan data yang bisa dikuantifikasi, sehingga membedakannya dengan pendekatan kuantitatif.

Pendekatan kualitatif memiliki beberapa karakteristik didalamnya. Karakteristik tersebut yaitu; (1) bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu kejadian sosial, (2) membuat seorang peneliti menjadi bagian dari alat penelitian, (3) data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka (kuantifikasi), melainkan dalam bentuk kata-kata dan gambar. (4) Objek yang diteliti biasanya memiliki jumlah yang kecil dan tidak dipilih secara acak. Terakhir (5), pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan data yang bersifat verbal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Saeri, *Opcit* hal 15-16

¹⁰ Archer, Clive. *International Organizations. Third Edition. London and New York: Routledge, 2001*

¹¹ Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES, 1990*

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kinerja *Human Rights Watch* (HRW) dalam Konflik Agama yang sedang berlangsung di India pada tahun 2019-2022 dengan menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana peran HRW dalam Konflik agama di India pada masa pemerintahan Narendra Modi 2019-2022?”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dalam Konflik Agama yang terjadi di India 2019-2022, bagaimana HRW berperan penting dalam kasus yang ditanganinya. Pertama, jika dilihat peran HRW sebagai Aktor non negara, dapat dilihat bahwa selama terjun ke lapangan, HRW melakukan investigasi tanpa adanya intervensi dari Negara dalam kasus yang ditanganinya. Hal ini terbukti selama pengumpulan rapor tahunan HRW 2019-2022 di seluruh Negara di dunia, termasuk India tanpa ada campur tangan dari Negara lain. Kedua, HRW sebagai arena dapat dilihat bagaimana HRW berusaha membuka forum mengenai kasus pelanggaran HAM, termasuk konflik Agama di India, salah satunya ialah HRW pernah membuka forum di Washington DC pada tahun 2016 disaat India diwakili PM India, Narendra Modi hadir dalam kunjungan kerjanya guna membahas konflik yang terjadi di India dengan HRW dan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Ketiga, Jika dilihat peran HRW sebagai instrumen, laporan HRW 2019-2022 dipakai oleh forum Internasional, termasuk PBB dalam kasus HAM yang terjadi di India sebagai alat bukti yang valid. Meskipun HRW dan PBB telah berusaha dalam menangani konflik Agama di India 2019-2022, usaha HRW terkesan sia-sia. Hal ini dikarenakan pemerintahan India era Modhi menolak untuk bersikap dan justru mengecam tindakan yang dilakukan HRW dan PBB terhadap negaranya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak maunya pemerintahan Modhi meninjau kembali Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 yang telah diamandemen dari UU 1955.

Kemudian India juga menyalahkan PBB karena hanya terlalu mementingkan masyarakat yang beragama Islam, Kristen dan Yahudi sementara agama Sikh, Hindu, dan Budha PBB hanya diam seribu bahasa ketika mengalami konflik yang terkesan tebang pilih. Hal ini tertuang dalam siding umum PBB pada Rabu, 2 Desember 2020 mengenai “Budaya Perdamaian”¹².

Kemudian Kemajuan dalam bidang hak asasi manusia di India akan terus terhambat kecuali pemerintahan Modi mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas bagi semua warga negara, melindungi komunitas yang rentan, dan melindungi kebebasan bertukar pikiran dan perbedaan pendapat. Kurangnya implementasi undang-undang dan kebijakan yang efektif masih menjadi tantangan yang terus-menerus. Pejabat pemerintah tidak bertanggung jawab dan impunitas tetap ada pada polisi dan personel keamanan lainnya yang dilindungi undang-undang agar tidak dituntut atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

SIMPULAN

Human Rights Watch (HRW) merupakan organisasi internasional non pemerintah (INGO) yang terbentuk berdasarkan “*Helsinki’s Watch*” yang merupakan penyempurnaan dari Helsinki’s Final Act 1975, di New York City, Amerika Serikat pada tahun 1978. Organisasi Internasional ini dibentuk menyelidiki pelanggaran hak di negara-negara yang menandatangani Kesepakatan Helsinki, terutama negara-negara di balik Tirai Besi seperti Uni Soviet. Sejak itu, HRW tersebar luas ke lima benua. HRW menyelidiki pembantaian dan bahkan genosida, bersama dengan pengambilalihan media oleh pemerintah

¹²

Bhagavant.<https://berita.bhagavant.com/2020/12/16/india-mu-pbb-gagal-akui-kekerasan-terhadap-agama-buddha-hindu-dan-sikh.html>

dan penangkapan aktivis dan tokoh oposisi politik yang tidak berdasar. Pada saat yang sama, HRW memperluas pekerjaan ruang lingkup kerja untuk mengatasi pelanggaran terhadap mereka yang menghadapi diskriminasi, termasuk perempuan, kelompok LGBT, dan penyandang disabilitas.

Sejarah konflik agama Hindu-Islam sudah lama terjadi di India sejak 1947 dimana umat Hindu-Islam berkonflik satu sama lain di India yang dimana berujung terbentuknya Pakistan serta terbunuhnya salah satu tokoh umat Hindu oleh Ekstrimis Hindu yang anti-Islam saat itu, Mahatma Gandhi.

Hingga saat ini, India yang dipimpin oleh Perdana Menteri India dari Partai Bharatiya Janata (BJP) Narendra Modhi, konflik Hindu-Islam semakin meningkat sehingga kasus pelanggaran HAM berat terus menimpa umat Islam di konflik tersebut.

Pemerintah India yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang beraliran nasionalis Hindu meningkatkan tindakan kekerasannya terhadap masyarakat sipil dan media. Pihak berwenang menuntut para aktivis, jurnalis, pengunjung rasa damai, dan pengkritik lainnya atas tuduhan kontraterorisme dan ujaran kebencian yang dibuat-buat. Mereka menutup kelompok-kelompok hak asasi manusia dengan menggunakan peraturan pendanaan asing atau tuduhan penyimpangan keuangan yang tidak berdasar. Pemerintah telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi agama minoritas, terutama Muslim. Hal ini, ditambah dengan fitnah terhadap Muslim dan minoritas lainnya oleh beberapa pemimpin BJP, dan kegagalan polisi untuk menindak para pendukung pemerintah yang melakukan kekerasan, telah mendorong kelompok-kelompok nasionalis Hindu untuk menysar anggota masyarakat minoritas atau kelompok masyarakat sipil tanpa hukuman selama masa pemerintahan Narendra Modhi (2019-2022).

Di era pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modhi tahun 2019-2022, keamanan umat Islam di India semakin terancam dengan adanya eskalasi konflik umat Hindu dengan umat Islam yang semakin merajalela, terhitung sejak 4 Desember 2019, Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Kewarganegaraan India 1955 mengatur naturalisasi menjadi warga negara India bagi beragama Sikh, Hindu, Buddha, Nasrani, Jain, dan Parsi dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh yang ingin memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014. Undang-Undang ini diprotes keras oleh masyarakat India yang beragama Islam karena tidak bisa menjadi warga negara India dan bahkan membungkam eksistensi Islam di India.

India mengalami konflik agama antara tahun 2019 hingga 2022, yang ditandai dengan adanya bentrokan antar kelompok agama dan diskriminasi terhadap minoritas agama. Konflik agama ini melibatkan kelompok Hindu dan Muslim, dan memiliki akar masalah yang berkaitan dengan perbedaan budaya dan politik.

Selama 2019-2022, HRW mengumpulkan bukti-bukti tindakan kekerasan HAM yang terjadi di India imbas UU Kewarganegaraan 2019 yang berujung konflik agama yang tidak berpihak kepada masyarakat Muslim. Dengan melakukan wawancara terhadap korban yang terdampak konflik agama dan juga penelitian secara langsung di lapangan. Terbukti dengan usaha yang dilakukan HRW, berdasarkan laporan-laporan yang didapatkan oleh HRW, dalam laporannya, HRW memiliki bukti kuat yang banyak terkait konflik agama yang terjadi di India, khususnya masyarakat Muslim yang lebih banyak menjadi korban oleh rezim Modhi dengan anggota RSS dan juga BJP. Tercatat, selama 2019-2022, HRW berhasil mengumpulkan bukti kekerasan konflik

agama di 2019-2022 dengan laporan dokumen yang telah disusun berdasarkan edisi yang disertai tahun keluarannya.

Dalam tugas berat yang ditanganinya, HRW berperan sebagai arena yang dimana HRW memfasilitasi diskusi antara Amerika Serikat dan India dimana saat itu di tahun 2016 PM India, Narendra Modhi melakukan kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat. Berdasarkan laporan dari Direktur Kebijakan Asia dari Human Rights Watch, John Sifton, HRW mengutus salah satu delegasinya, yaitu Tom Lantos dalam undangan kongres dari Presiden Amerika saat itu, Barack Obama.

Tentu bagi pemerintah India di era Narendra Modhi, harus menyampaikan keprihatinannya terhadap catatan Amerika Serikat dalam hal hak asasi manusia dan, sebagai perwakilan dari HRW, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang bekerja di lebih dari 90 negara di seluruh dunia meminta untuk mendorong Perdana Menteri Modi membahas permasalahan Hak Asasi Manusia yang terjadi di India.

Imbas HRW mempublikasikan laporan konflik agama yang terjadi selama di India 2019-2022, PBB sampai turun tangan ingin melihat lebih langsung dan juga membawa kasus ini ke ranah PBB dengan serius mengingat akibat Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 India ini.

Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, PBB sedang memantau kondisi konflik agama yang terjadi di India, khususnya konflik antara Hindu dan Islam. Dujarric mengimbau otoritas keamanan India untuk memastikan pengunjung rasa berdemo dengan damai di sana. Pendemo tak perlu dilawan dengan kekerasan oleh petugas keamanan.¹³

¹³ Nashrullah, Nashih. *PBB Pantau Konflik Antara Hindu dan Muslim di India* <https://sindikasi.republika.co.id/berita/q6aojk320/pbb-pantau-konflik-antara-hindu-dan-muslim-di-india>

Sekjen PBB saat ini, Antonio Guterres memperingatkan India untuk mengakhiri rasisme terhadap umat Islam, terutama sejak pandemi virus corona. Hal itu disampaikan dalam pesan yang disampaikan dalam rangka Hari Peringatan Internasional Korban Kekerasan Berdasarkan Keyakinan Agama.

Guterres mengatakan bahwa di India, para pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dan saluran berita pro-pemerintah dengan cepat menyalahkan umat Islam atas meningkatnya jumlah kasus virus corona. Dengan menggambarkan jamaah Tabligh sebagai penyebar virus.

Dalam kesempatan tersebut, Guterres juga mengatakan bahwa umat Islam telah diserang, tidak diberikan perawatan medis, dan menjadi sasaran boikot karena kekhawatiran terhadap virus Covid-19. Ia memperingatkan bahwa hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan tertanam kuat dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Sejak Februari tahun lalu, PBB telah memantau konflik mematikan antara kelompok Hindu dan Muslim di New Delhi. Hal ini terkait dengan aturan kewarganegaraan India. Dalam undang-undang ini, pemerintah India akan memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi non-Muslim dari tiga negara

Hal ini menimbulkan tuduhan bahwa Modi dan nasionalis Hindu, khususnya Partai Bharatiya Janata (BJP), menghancurkan tradisi sekuler India. BJP membantah adanya bias terhadap lebih dari 180 juta minoritas Muslim di India. Namun selama dua bulan, pengunjung rasa telah melakukan protes dan mendirikan kamp di beberapa wilayah New Delhi.

Umat Islam di India menghadapi diskriminasi di berbagai bidang, termasuk pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Banyak orang menghadapi hambatan dalam mencapai kekuasaan politik dan kekayaan. Umat Islam juga kekurangan akses terhadap layanan kesehatan dan layanan dasar.

Laporan LSM Common Cause pada tahun 2019 menemukan bahwa setengah dari petugas polisi yang disurvei memiliki bias anti-Muslim. Artinya, kecil kemungkinan mereka melakukan intervensi untuk menghentikan kejahatan terhadap umat Islam.¹⁴

Dalam artikel berjudul “Muslim India: Populasi yang Semakin Terpinggirkan” yang diterbitkan di situs web Council on Foreign Relations (CFR), para analis mencatat bahwa mereka yang menyerang umat Islam sering kali mendapat impunitas. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan dan lembaga pemerintah terkadang membatalkan hukuman atau membatalkan dakwaan yang menuduh umat Hindu terlibat dalam kekerasan terhadap tetangga Muslim mereka

Meskipun usaha HRW berhasil melakukan investigasi konflik agama yang terjadi di India 2019-2022, Usaha HRW terkesan sia-sia. Hal ini dikarenakan pemerintahan India era Modhi menolak untuk bersikap dan justru mengecam tindakan yang dilakukan HRW dan PBB terhadap negaranya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak maunya pemerintahan Modhi meninjau kembali Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 yang telah diamandemen dari UU 1955.

Kemudian India juga menyalahkan PBB karena hanya terlalu mementingkan masyarakat yang beragama Islam, Kristen dan Yahudi sementara agama Sikh, Hindu, dan Budha PBB hanya diam seribu bahasa ketika mengalami konflik yang terkesan tebang pilih. Hal ini tertuang dalam siding

umum PBB pada Rabu, 2 Desember 2020 mengenai “Budaya Perdamaian”¹⁵.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Nawaz, Shuja (May 2008), "The First Kashmir War Revisited", *India Review*, 7 (2): 115–154, doi:10.1080/14736480802055455, S2 CID 155030407

Hardiman, David (2003), *Gandhi in His Time and Ours: The Global Legacy of His Ideas*, Columbia University Press, pp. 174–76, ISBN 9780231131148

M. Saeri, “Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik,” *Jurnal Transnasional*, Volume 3, Nomor 2 (2012): hal 2

Johnson, Matthew; Garnett, Mark; Walker, David M (2017), *Conservatism and Ideology*, Routledge, p. 77, ISBN 978-1-317-52899-9, retrieved 25 March 2021, A couple of years later, India was ruled by the Janata coalition, which consisted also of Bharatiya Jana Sangh (BJS), the then-political arm of the extreme right-wing Hindu nationalist Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS – National Volunteers Organisation).

Rusmianti, Nur Madya *EJOURNAL-NUR MAYDA RUSMIANTI*, (09-29-21-04-54-50).pdfEJOURNAL

Buku

Yasin, Zaeem. , dan Hassan dkk, “Arab World’s Criticism on Indian Islamophobia: Understanding Islamic Perspective”, *Global Political Review*, Vol. V, No. IV (Fall 2020), 50,

¹⁴ Hafil, Muhammad. *Sekjen PBB Bersikap Soal Rasisme India Terhadap Muslim*

<https://khazanah.republika.co.id/berita/qfi16f430/s-ekjen-pbb-bersikap-soal-rasisme-india-terhadap-muslim>

¹⁵

Bhagavant.<https://berita.bhagavant.com/2020/12/16/india-mu-pbb-gagal-akui-kekerasan-terhadap-agama-buddha-hindu-dan-sikh.html>

[https://doi.org/10.31703/gpr.2020\(V-IV\).06](https://doi.org/10.31703/gpr.2020(V-IV).06).

Viotti, Paul R. , dan Mark V. Kauppi. International Relations Theory. Fifth Edition, New York: Longman, 2011

Social Conflict and the Theory of Social Change Author(s): Lewis A. Coser Source: The British Journal of Sociology, Vol. 8, No. 3 (Sep., 1957), pp. 197-207 Published by: Wiley on behalf of The London School of Economics and Political Science Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/586859>.

Mas'ood, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES, 1990.

Archer, Opcit, hal 33

Archer, Clive. International Organizations. Third Edition. London and New York: Routledge, 2001

John Locke's Second treatise of government, 1690

Dokumen Resmi

International Religious Freedom Report for 2021 "INDIA 2021 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT"
<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/INDIA-2021-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf>

Human Rights Watch “ HRW Report 2019 India” <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/india>

Human Rights Watch “ HRW Report 2020 India” <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/india>

Human Rights Watch “ HRW Report 2021 India” <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/india>

Human Rights Watch “ HRW Report 2022 India” <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/india>

CSCE “The Helsinki Process: An Overview”
<https://www.csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov/files/The%20Helsinki%20Process%20Four%20Decade%20Overview.pdf>

"The Citizenship (Amendment) Bill, 2019" (PDF). PRS India.

Meenakashi, Ganguly..
<https://www.hrw.org/report/2019/02/19/violent-cow-protection-india/vigilante-groups-attack-minorities>

Meenakashi, Ganguly. BJP Government Must Acknowledge Critics' Fears and Stop Resorting to Majoritarian Victimhood
<https://www.hrw.org/news/2020/03/13/bjp-government-must-acknowledge-critics-fears-and-stop-resorting-majoritarian>

Meenakashi, Ganguly. “Shoot the Traitors” Discrimination Against Muslims under India’s New Citizenship Policy
<https://www.hrw.org/report/2020/04/10/shoot-traitors/discrimination-against-muslims-under-indias-new-citizenship-policy>

Braunschweiger, Amy. Interview with Meenakeshi, Gaudi.: The Human Rights Crisis Behind India’s Covid-19 Surge
<https://www.hrw.org/news/2021/05/10/interview-human-rights-crisis-behind-indias-covid-19-surge>

Assam Accord IN_850815_Assam Accord.pdf

OSCE : Helsinki Final Act signed by 35 participating States
<https://www.osce.org/mc/58376>

HRW: About Us
<https://www.hrw.org/about/about-us>

HRW : About Our Research
<https://www.hrw.org/about/about-us/about-our-research#5>

Shifton,
John.<https://www.hrw.org/news/2016/06/07/challenges-opportunities-advancement-human-rights-india>

Ganguly, Meenakshi. India's Protesters Should be Heard, Not Assaulted
<https://www.hrw.org/news/2019/12/18/indias-protesters-should-be-heard-not-assaulted>

Meenakshi, Ganguly. India: Citizenship Bill Discriminates Against Muslims
<https://www.hrw.org/news/2019/12/11/india-citizenship-bill-discriminates-against-muslims>

Ganguly, Meenakshi. Narendra Modi's next challenge is to contain his extremist supporters
<https://www.hrw.org/news/2019/05/30/narendra-modis-next-challenge-contain-his-extremist-supporters>

Braunschweiger, Amy. Interview with Meenakeshi, Gaudi.: The Human Rights Crisis Behind India's Covid-19 Surge
<https://www.hrw.org/news/2021/05/10/interview-human-rights-crisis-behind-indias-covid-19-surge>

Meenakeshi, Gaudi. India Cannot Expect to Beat Covid-19 Without Tackling Hate and Corruption
<https://www.hrw.org/news/2020/05/26/india-cannot-expect-beat-covid-19-without-tackling-hate-and-corruption>

Guterres, António. UN Chief Admonishes India to Protect Rights of Minorities
<https://www.hrw.org/news/2022/10/21/un-chief-admonishes-india-protect-rights-minorities>

Bhagavant.<https://berita.bhagavant.com/2020/12/16/india-mu-pbb-gagal-akui-kekerasan-terhadap-agama-buddha-hindu-dan-sikh.html>

Websites

<https://www.mapsofindia.com/>
Gringlas, Sam "India Passes Controversial Citizenship Bill That Would Exclude Muslims",
<https://www.npr.org/2019/12/11/787220640/india-passes-controversial-citizenship-bill-that-would-exclude-muslims>
Samuel, Sigal "India just redefined its citizenship criteria to exclude Muslims, "Vox. <https://www.vox.com/future-perfect/2019/12/12/21010975/india-muslim-citizenship-bill-national-register>
Deka, Kaushik (12 Desember 2019). "Citizenship Amendment Bill protests: Here's why Assam is burning" <https://www.indiatoday.in/mail-today/story/citizenship-bill-protests-here-why-assam-is-burning-1627538-2019-12-11>

Dhillon, Amrit " How BJP's Nupur Sharma's Prophet Mohammed comments pushed India into diplomatic maelstrom <https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/3181031/how-bjps-nupur-sharmas-prophet-mohammed-comments-pushed-india> (4.37 PM, 9 Jun, 2022)

BBC: Citizenship Amendment Act: India PM Modi appeals for calm as protests grow "India PM plea for calm as citizenship unrest rages" <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50805092> . 16 Desember 2019.

Grover, Samarth (22 December 2021). "Narsinghanand Organises 3-Day Hate Speech Conclave in Haridwar". The Quint.

Seemi Pasha (12 March 2020). "Ground Report: As Amit Shah Praises Delhi Police, Riot Victims Tell a Different Story". The Wire. Retrieved 14 March 2020.

"Two complaints filed against BJP leader Kapil Mishra for inciting violence in NorthEast Delhi". DNA India. 25 February 2020. Retrieved 25 February 2020.

Human Rights Watch "India"
<https://www.hrw.org/asia/india>

Arum Sutrisni Putri, "Jenis-jenis Ancaman Terhadap Integrasi Nasional," Kompas, https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/25/170000069/jenis-jenis-ancaman-terhadap-integrasi-nasional?page=all&jxconn=1*qbald5*other_jxampid*ZWx4aGc4VlRGdjRMbWFwV0FCZ3I1dGd1WUVvQWNsUXRHX0VDdEhUOE1FX0xwNE1pcm43b2VvN1JNOHA2MkxYNA..#page2 (diakses 3 September 2022)

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada 3 September 2022)

Umi Chulsum-Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: 2006 Yoshiko Press, cet. pertama)

Narendra Modhi
<https://www.britannica.com/biography/Narendra-Modi>

Live World Population Clock "India"
<https://worldpopulationclock.info/india>

Logo Partai BJP <https://www.bjp.org/>

AASU stages Satyagraha against CAA, over 1000 protesters detained in Guwahati
<https://www.indiatoday.in/india/story/aasu-stages-satyagraha-against-caa-over-1000-protesters-detained-in-guwahati-1628799-2019-12-16>

1,000 detained as anti-Citizenship Amendment Bill protests intensify in Assam
<https://www.indiatoday.in/india/story/anti-citizenship-amendment-bill-assam-protest-1627464-2019-12-11>

Anti-CAB protests turn violent in Tripura
<https://timesofindia.indiatimes.com/city/agartala/anti-cab-protests-turn-violent-in-tripura/articleshow/72472009.cms>

[artala/anti-cab-protests-turn-violent-in-tripura/articleshow/72472009.cms](https://timesofindia.indiatimes.com/city/agartala/anti-cab-protests-turn-violent-in-tripura/articleshow/72472009.cms)

Protests rock NE, internet shut in Tripura
<https://www.telegraphindia.com/north-east/protests-rock-ne-internet-shut-in-tripura/cid/1725767>

Vincent, Pheroze L. Different protest voices at Jantar Mantar
<https://www.telegraphindia.com/india/different-protest-voices-at-jantar-mantar/cid/1727006>

Delhi: Anti-CAA protest turns violent as 3 buses burnt in Jamia Nagar
<https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/delhi-anti-caa-protesters-set-fire-on-buses-jamia-millia-islamiah-students-blamed/videoshow/72683068.cms>

Prabhu, Sunil "I'm A Mother...": Priyanka Gandhi Condemns Cops' Crackdown On Students
<https://www.ndtv.com/india-news/priyanka-gandhi-vadra-leads-congress-protest-at-india-gate-against-police-crackdown-on-delhi-student-2149694>

Protests against Citizenship Amendment Act continue in UP
<https://www.hindustantimes.com/lucknow/protests-against-citizenship-amendment-act-continue-in-up/story-xFxDfPruuMyjIVPrsjTo6I.html>

Violent CAA protests take 3 lives in 2 states, internet shutdown, restrictions send ripples in Delhi: Highlights
<https://www.indiatoday.in/india/story/violent-caa-protests-take-3-lives-internet-shutdown-mangaluru-deaths-highlights-1629878-2019-12-19>

Uttar Pradesh CAA protests in numbers: 19 dead, over 1,100 arrested for violence
<https://www.indiatoday.in/india/story/caa-protests-uttar-pradesh-numbers-1631855-2019-12-27>

Death toll touches 16 in U.P. as protests continue
<https://www.thehindu.com/news/national/uttar-pradesh-death-toll-touches-16-in-up-as-protests-continue>

[ational/anti-kaa-protests-toll-rises-to-15-in-uttar-pradesh-vandalism-during-bihar-bandh/article30368185.ece](https://indianexpress.com/article/india/citizenship-amendment-act-kaa-protest-live-updates-rahul-gandhi-uttar-pradesh-assam-6188619/)

CAA Protests Highlights: Priyanka claims UP cops 'manhandled' her while visiting arrested activist's house
<https://indianexpress.com/article/india/citizenship-amendment-act-kaa-protest-live-updates-rahul-gandhi-uttar-pradesh-assam-6188619/>

Goradia, Abha Students of IIT-Bombay protest passage of CAB
<https://indianexpress.com/article/india/students-of-iit-bombay-protest-passage-of-cab-6162608/>

Nath, Kumar Hemanta 2 minor boys killed in police firing during anti-CAB protests in Guwahati
<https://www.indiatoday.in/india/story/citizenship-amendment-act-kaa-protests-guwahati-minor-boys-dead-1628160-2019-12-13>

7 killed as U.P. protests against citizenship law turn violent
<https://www.thehindu.com/news/national/6-killed-as-up-protests-against-citizenship-law-turn-violent/article61604426.ece>

Citizenship Act protests: 16 people killed in Uttar Pradesh, 131 arrested in just one district
<https://scroll.in/latest/947486/kaa-protests-seven-killed-in-uttar-pradesh-chandrashekhar-azad-surrenders-in-delhi>
Abdul, Muhaemin. Sebagian Besar Media India Menyalahkan Muslim Atas Penyebaran Virus Corona
<https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01383382/sebagian-besar-media-india-menyalahkan-muslim-atas-penyebaran-virus-corona?page=3>

Hafil, Muhammad. Nasib Jamaah Tabligh yang 'Dikambing Hitamkan'
<https://khazanah.republika.co.id/berita//qx>

[o0ds430/nasib-jamaah-tabligh-yang-dikambing-hitamkan](https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59047517)
Bhaumik, Subi Tripura: Anti-Muslim violence flares up in Indian state.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59047517>

Yolanda, Frishka. Larangan Hijab Perdalam Ketegangan Hindu-Muslim India
<https://internasional.republika.co.id/berita/r8snre370/larangan-hijab-perdalam-ketegangan-hindumuslim-india-part1>

Pandey, Geeta. Nupur Sharma: The Indian woman behind offensive Prophet Muhammad comments
<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-61716241>

Nashrullah, Nashih. PBB Pantau Konflik Antara Hindu dan Muslim di India
<https://sindikasi.republika.co.id/berita/q6a0jk320/pbb-pantau-konflik-antara-hindu-dan-muslim-di-india>

Hafil, Muhammad. Sekjen PBB Bersikap Soal Rasisme India Terhadap Muslim

<https://khazanah.republika.co.id/berita/qf16f430/sekjen-pbb-bersikap-soal-rasisme-india-terhadap-muslim>

Maizland, Lindsay. India's Muslims: An Increasingly Marginalized Population
<https://www.cfr.org/background/india-muslims-marginalized-population-bjp-modi>

Bhagavant.
<https://berita.bhagavant.com/2020/12/16/india-mu-pbb-gagal-akui-kekerasan-terhadap-agama-buddha-hindu-dan-sikh.html>

Religion Composition in India 2020
<https://web.archive.org/web/20200615053333/https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/number/all/>